

BAB II

POLITIK PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM DAN LUAR NEGERI MALAYSIA DAN KOREA UTARA

Politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide, atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, suatu kualitas yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar untuk menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Konsep sistem politik merupakan pokok dari pembaharu yang timbul dalam dekade lima puluhan. sistem politik merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang yang terdapat dalam masyarakat. (Budiardjo, 2008).

Sebagai pembentuk suatu bangsa-negara sangat berkaitan dengan pembentukan identitas, yang meliputi primordial, sakral, tokoh, konsep, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Primordikal yaitu ikatan darah atau kekerabatan, yang merasakan perasaan senasib atau memiliki kesamaan budaya, atau bahasa . kemudian sakral yaitu kesamaan agama dalam suatu masyarakat atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat. Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati oleh halayak banyak dapat menyatukan masyarakat dan membentuk sebuah negara-bangsa. Persepsi yang sama terkait asal-usul nenek moyang atau pengalaman masa lalu misalnya dari penjajahan, akan melahirkan solidaritas serta tekad yang kuat serta tujuan sama dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi juga akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beragam, semakin bervariasi masyarakat, maka semakin tinggi tingkat saling kebergantungan sat dengan yang lain. kelembagaan seperti angkatan bersenjata dan partai politik akan memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan negara-bangsa adalah alasan adanya kelembagaan tersebut. (Surbakti, 2010).

Ideologi yang merupakan pola rumusan atau pandangan atau suatu sistem nilai yang hendak dicapai oleh masyarakat, dan mengenai cara-cara yang dianggap baik untuk

mencapai tujuan. Terdapat dua ideologi dalam masyarakat, pertama cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh masyarakat. Ideologi ini menjadi pedoman dalam membuat keputusan politik dan patokan untuk menilai keberhasilan keputusan politik. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat untuk menyelesaikan konflik. (Surbakti, 2010).

Pengertian dasar dari Politik Luar Negeri adalah '*action theory*', atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri. (Perwita & Yani, 2005).

2.1. Kebijakan Politik Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan bentuk negara Monarki Konstitusional, Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, kabinet yang bertugas dipilih oleh Perdana Menteri atas persetujuan Raja, saat ini Yang di-Pertua Agong Sultan Muhammad V sebagai kepala negara, Yang Amat Berbahagia Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri yang menjabat, beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem hukum yang diterapkan di Malaysia berdasarkan hukum inggris, dan hukum islam turut diterapkan kepada penganut agama islam dalam hal pengaturan keluarga dan agama. (Selayang Pandang Malaysia, 2018).

Malaysia adalah negara yang memiliki stabilitas, dalam stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan sosial yang harmonis. Sebagai negara berkembang dan juga menuju era negara maju, Malaysia sedang berusaha memperkuat posisinya melalui mekanisme dasar eksternal. Kebijakan eksternal suatu negara sering kali mencerminkan pencapaian dan keberhasilan administrasi negara itu sendiri. Namun, juga dipengaruhi oleh bentuk dasar dan orientasi seorang pemimpin di suatu negara.

Kebijakan eksternal memainkan peran penting bagi suatu bangsa, bukan hanya karena menjamin kepentingan nasional, tetapi juga memperhambat ancaman orang luar untuk merusak keamanan nasional. Selain itu, dapat juga mencerminkan sikap suatu negara dalam hubungan bilateral dengan negara lain. Ini adalah kelanjutan dari kebijakan domestik yang ditujukan untuk menjaga dan menjaga keamanan, harmoni, kemakmuran ekonomi dan kepentingan nasional lainnya. (Omar, 2010).

Kebijakan luar negeri Malaysia juga sering dilihat tidak statis, di mana pembentukannya merupakan proses yang dinamis dan berkembang dengan mempertimbangkan perubahan di dalam kepemimpinan, kondisi politik dan ekonomi global yang selalu berubah. Karena setelah mencapai kemerdekaan sejauh ini, Malaysia tidak pernah mengisolasi diri dari komunitas internasional dan telah menunjukkan kebijakan luar negeri yang aktif secara internasional dan regional. Malaysia telah memainkan peran yang efektif dalam sistem politik internasional dan setiap tindakan yang diambil berkaitan erat dengan kebijakan domestik negara, yaitu kebijakan membangun perdamaian, kemerdekaan dan semangat kerjasama dalam hubungan internasional. (Omar, 2010).

Parlemen atau Parlimen terdiri dari dua dewan, yang pertama yaitu Dewan Negara yang terdiri 70 kursi, 44 ditunjuk oleh Raja, 26 dipilih oleh 13 perwakilan negara bagian dengan masa jabatan 3 tahun dan dibatasi dua kali masa jabatan. Dewan yang kedua Dewan Rakyat yang terdiri dari 222 kursi yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun. Dengan sistem politik multi partai, yaitu United Malays National Organisation (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Pada Pemilu 2008 lalu, UMNO merupakan koalisi partai oposisi yaitu Democratic Action Party, Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan

jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang bagi Malaysia untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu. (Daulay, 2013).

Konsep Islam Hadhari menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas. UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional. Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. (Daulay, 2013).

Nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan. Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam. Negara yang bernilai Islam Perjuangan politik PAS yaitu mendirikan negara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Namun, idealisme tersebut tampaknya sulit diwujudkan di tengah pluralisme masyarakat. PAS dinilai sektarian sehingga sulit diterima masyarakat yang mendambakan keutuhan dan persatuan bangsa. Melihat

persaingan politik yang terjadi antara UMNO dan PAS dengan mengangkat isu-isu keislaman, yang lebih dominan lagi dengan aspek penafsiran. Bagi UMNO, perjuangan politik untuk memajukan Islam di Malaysia tidak harus dengan menjadikan Malaysia negara Islam, tetapi yang lebih penting justru esensi nilai-nilai Islam yang bisa diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan politik. Bagi PAS, perjuangan Islam itu harus diwujudkan secara formal dengan menjadikan Malaysia negara Islam. Dalam hal ini, UMNO tampaknya lebih realistis strategi politiknya di tengah kondisi rakyat Malaysia yang majemuk. (Daulay, 2013).

Sebagai bekas koloni Inggris, Malaysia mengembangkan politik luar negeri yang sesuai dengan kondisi negara yang sedang proses pemebentukan bangsa. Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Malaysia juga dipengaruhi sejarah, geografi, kesukuan melayu, etnisitas, serta dorongan yang kuat untuk menjadi industri modern. Pada tingkat domestik isu komunis merupakan persoalan paling mendasar bagi keberlangsungan Malaysia. Yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Malaysia sampai saat ini adalah karena visi luar biasa dari seorang Mahatir yaitu pemimpin Malaysia yang memiliki sebuah visi luar biasa dalam memajukan Malaysia. Secara umum gagasan Mahatir ini bertujuan untuk membangun kembali Malaysia sedemikian rupa sehingga setara dengan negara-negara maju. Untuk mewujudkan visinya Mahatir berusaha sekuat tenaga menciptakan stabilitas politik nasional. (Cipto, 2007).

Politik luar negeri Malaysia dipengaruhi dan dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu lokasi Malaysia yang strategis yang berada di Asia Tenggara, ciri-ciri Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan dan demografi penduduk yang unik. Prinsip dan asas politik luar negeri Malaysia masih kekal sejak kemerdekaan walaupun pendekatan kepada pelaksanaan kebijakan eksternal berubah berdasarkan faktor domestik. Penggubahan kebijakan eksternal sering dipadukan dengan kriteria-kriteria kredibiliti, konsistensi dan kepaduan yang telah bertindak untuk memelihara kepentingan negara. Malaysia juga

harus terus mempromosikan politik luar negerinya yang berpragmatik dan berwawasan agar dapat mempermudah perdagangan, menarik turis asing serta memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang stabil dan aman. Malaysia akan terus berusaha untuk menggalakkan kesederhanaan melalui inisiatif Global Movement of the Moderates (GMM) dan berusaha untuk menyumbang secara positif ke arah penyelesaian konflik secara aman di serata dunia. (Foreign Policy, 2018).

Tujuan utama dari hubungan antar negara Malaysia adalah menyerap, memelihara dan meningkatkan hubungan dua negara yang kukuh dengan semua negara tanpa mengambil sistem politik dan ekonomi mereka. Hubungan diplomatik yang mencakup bidang politik dan keselamatan, ekonomi, perdagangan, serta sains dan teknologi. Hal ini juga memberikan tumpuan kepada usaha mempromosikan, membangunkan, memelihara dan melindungi kepentingan dan imej Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur. Memantau dan menyediakan laporan dan penilaian bagi perkembangan politik dan ekonomi serta hal lain yang berkaitan dengan negara luar yang mempunyai kesan terhadap kepentingan Malaysia. Melaksanakan semua keputusan dan arahan pemerintah untuk menjaga hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain yang sejalan dengan politik luar negara Malaysia. Mengatur lawatan Ketua Negara, Ketua Kerajaan dan menteri asing ke Malaysia serta lawatan DYMM Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri ke luar negeri. (Departement of Bilateral Affairs, 2018).

Konstitusi Malaysia memberikan hak-hak istimewa bagi penduduk melayu untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor pelayanan masyarakat, pendidikan, beasiswa, pelatihan, serta mendapatkan akses bisnis. Hak-hak istimewa ini sengaja di berikan agar konstitusi melindungi dan memelihara kehormatan penduduk pribumi di hadapan penduduk non-pribumi. Kerusuhan rasial berdarah pada tahun 1969 memperkuat argument tentang pentingnya menjaga kehormatan

dan kesetaraan posisi penduduk pribumi di hadapan penduduk non-pribumi. Dominasi etnis melayu dalam politik Malaysia merefleksikan adanya interplay antara konsepsi keamanan etnis melayu dan konsepsi keamanan nasional. (Cipto, 2007, p. 122)

Konstitusi Malaysia mempertahankan kekuasaan dan wewenang para sultan di sembilan wilayah kesultanan Malaysia dan mewajibkan suku melayu di Malaysia memeluk agama islam. Selain agama islam, bahasa Malaya adalah unsur lain yang memperkuat konsepsi keamanan nasional mengingat keluasaan bahasa Malaysia dalam komunikasi resmi seperti dalam pendidikan, pemerintahan dan media massa, maupun komunikasi informal. (Cipto, 2007, p. 123). Selain itu sistem federasi juga memperkuat konsepsi keamanan Malaysia. Dibawah Perdana Menteri Mahathir Muhammad, sistem federasi ditegakkan dengan cara yang tegas dan keras. Secara keseluruhan keamanan domestic ditentukan oleh kemampuan mengembangkan dan mempertahankan stabilitas politik, kemajuan perekonomian, kemajuan industri. Dibawah Perdana Menteri Mahathir, Malaysia berusaha keras untuk memelihara stabilitas politiknya lewat kebijakan politik yang cenderung otoriter. Salah satu alat hokum yang sangat ditakuti kawan dan lawan adalah ISA (Internal Security Act). Dengan mengembangkan kebijakan ekonomi Malaysia berusaha menjadi negara yang secara ekonomi kuat seperti Jepang atau Korea Selatan. Kebijakan National Economic Policy (NEP), Sixth Malaysia Plan, serta National Development Policy (NDP) yang menggantikan NEP merupakan rangkaian kebijakan yang di arahkan untuk menggenjot perekonomian Malaysia agar dapat bersaing dengan negara maju lainnya. (Cipto, 2007, p. 124)

Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia memiliki visi yang luar biasa dalam memajukan Malaysia, di bawah pimpinan Mahathir Malaysia mengalami kemajuan perekonomian dan perpolitikan, secara umum Mahathir ingin membangun Malaysia sehingga dapat setingkat dengan negara-negara maju lainnya. Dengan memperkuat stabilitas politik

nasional dengan ditopang oleh Barisan nasional, kemudian Mahathir memanfaatkan stabilitas politik untuk menarik investor datang. (Cipto, 2007).

2.2. Kebijakan Politik Korea Utara

Korea Utara tumbuh menjadi negara komunis di bawah payung Uni Soviet pada Perang Dingin. Korea Utara terus memperkuat militernya yang secara jumlah personel jauh di atas militer Korea Selatan. Korea Utara memiliki 563 pesawat terbang yang dapat beroperasi. Namun kenyataannya, semua pesawat itu pernah tidak diterbangkan untuk sementara waktu pada 2014 karena masalah kurangnya perawatan. Figur Kim Jong Il menjadi musuh besar bagi negara-negara antikomunis seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Setelah meninggalnya Kim Jong Il pada akhir tahun 2011, Kim Jong Un diangkat untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi Presiden Korea Utara. (Putra, 2016).

Meski masyarakat Korea Utara telah bersumpah untuk setia pada Kim Jong Un, banyak pihak meragukan kemampuannya untuk memimpin Korea Utara. Hal ini disebabkan karena tidak seperti Kim Jong Il yang telah memerintah sebelum Kim Il Sung wafat, Kim Jong Un diangkat secara mendadak dan belum memiliki pengalaman sama sekali dalam mengatur negara. Kim Jong Un nampaknya menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang meragukannya. Untuk itu, Kim Jong Un memilih untuk mengunci posisinya sebagai jenderal tertinggi angkatan bersenjata terlebih dahulu dibandingkan menjadi pemimpin partai buruh atau ketua komisi pertahanan nasional. Dengan menguasai militer, Kim Jong Un memastikan bahwa dirinya akan mewarisi alat kontrol terpenting yang dimiliki negara juga kebijakan “military first” Kim Jong Il. (Putra, 2016)

Kebijakan luar negeri Korea Utara telah ditandai oleh beberapa tahap yang berbeda sejak berdirinya Republik Rakyat Demokratik Korea pada tahun 1948. Ideologi Korea Utara *juche* telah menekankan kemandirian dalam urusan luar negeri, tetapi ini tidak berarti isolasi diplomatik atau ekonomi. Korea Utara telah mengembangkan kebijakan yang berbeda mengenai

jangkauan diplomatik dalam konteks perubahan lingkungan geopolitik, dan telah menjalin hubungan negara lain. (Wertz, 2016).

Kebijakan luar negeri Korea Utara telah terjadi dalam beberapa tahap yang berbeda sejak berdirinya Democratic People's Republic of Korea pada tahun 1948. Pada tahun-tahun awal, Korea Utara mempertahankan hubungan diplomatik secara eksklusif dengan negara-negara blok Timur, bersama dengan Republik Rakyat Cina dan revolusioner Vietnam. Pada 1960-an dan 1970-an, Korea Utara mulai menjangkau negara-negara dunia ketiga yang muncul dari kolonialisme, bersaing dengan Korea Selatan untuk pengakuan dan legitimasi diplomatik. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara meningkatkan kontak diplomatiknya dengan negara-negara kapitalis termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Korea Utara telah mengembangkan kebijakan yang berbeda mengenai jangkauan diplomatik dalam konteks perubahan lingkungan geopolitik, dan telah menjalin hubungan dengan sejumlah besar negara, dengan pengecualian termasuk Jepang dan Amerika Serikat (hubungan antar-Korea menjadi isu yang agak terpisah). (Wertz, 2016). Korea Utara merupakan negara sosialis. Konstitusi 1972 Republik Rakyat Democratic Korea, dalam pasal 1, menyatakan bahwa "Republik Rakyat Democratic Korea adalah negara sosialis merdeka yang merepresentasikan kepentingan seluruh rakyat Korea". Pasal tersebut telah mendeklarasikan bahwa Korea Utara adalah negara sosialis, dan pada 2009 lalu Korea Utara telah menghapus kata komunisme dari konstitusinya. (Sadzikri, 2017).

Ideologi yang digunakan Korea Utara yaitu Juche yang di kembangkan oleh Presiden Kim Il Sung yang merupakan varian baru dari paham marxisme, dan di bentuk pada pertengahan 1960an, Kim Il Sung mengembangkan ideologi juche yang ingin mengembangkan era dimana setiap orang dapat membentuk takdirnya sendiri, dan kemudian juche menggantikan ideology marxisme-leninisme yang merupakan ideologi Korea Utara dulu. (Patra, 2012).

Istilah ‘Juche’ pertama kali diungkapkan secara resmi di dalam pidato yang dilaksanakan oleh Kim dalam sidang propaganda dan promosi partai buruh Korea pada 28 Desember 1955, pada awalnya, ideologi Juche diperkenalkan sebagai suatu pedoman untuk arah proyek terkait ideologi, tetapi dalam proses berlanjutnya penghapusan beberapa fraksi anti Kim dalam intern partai buruh, ideologi itu tersebar luas dan diterapkan lebih luas sebagai ideologi untuk independen di berbagai bidang termasuk ekonomi, dan juga pertahanan. Setelah itu, saat Soviet dan Cina saling konflik dengan masalah ideologi tentang revisionist berkembang, Juche juga diterapkan sebagai pedoman di bidang diplomatik. Dan menkokohkan landasan penguasaan tunggal dan pekerjaan untuk mendewakan Kim secara besar-besaran selesai, rejim Korea Utara menciptakan ‘sistem ideologi tunggal’. Istilah itu tidak lain yaitu ‘ideologi Juche’ yang berarti perwujudan kesatuan politik dan ideologi di masyarakat Korea Utara berdasarkan ideologi Juche. (kbsworld, 2016).

Dalam sidang Partai Buruh Korea ke-5 pada tahun 1970, ‘Juche’ diresmikan sebagai ideologi resmi partai di negara komunis. Menurut konstitusi yang direvisi pada tahun 1982, ‘Juche’ ditetapkan sebagai ideologi nasional resmi Korea Utara. Pada tahun 1974, Juche resmi dinamakan sebagai ‘Kim Il-sungisme’ (atau Kimisme), sebagai sistem ideologi revolusioner yang baru dan unik, dan sebagai teori yang mencerminkan keperluan mendatang era ‘Juche’ dengan baru. ‘Kimisme’ dibedakan dengan Marx-Leninisme, dan bahkan ideologi ‘Kimisme’ itu diklaim nantinya sebagai ideologi lebih unggul daripada Marx-Leninisme itu. Mempertimbangkan kenyataan bahwa Kim Jong Il mulai ditampilkan resmi pada umum sebagai pewaris kekuatan pada 1974, Juche adalah sangat berhubungan erat dengan bukan hanya ‘sistem penguasaan tunggal Kim Il-sung’, melainkan juga pembangunan ‘sistem pewarisan ke anaknya, Kim Jong-il’. (kbsworld, 2016).

Diawali tahun 1982, ideologi regim komunis yang khas itu lebih berkembang dan disusun rapi secara teori di dalam konteks politik, ekonomi, militer, maka ditempatkan sebagai

prinsip operasional kenegaraan Korea Utara. Kim Jong-il mengklaim bahwa ayahnya pertama kali mendeklarasi pembangunan ‘ideologi Juche’ di dalam pertemuan ‘Federasi Pemuda Anti imperialisme yang diadakan di Manchuria pada Juni 1930. Namun, mempertimbangkan kenyataan bahwa Kim Il-sung berjuang anti-Jepang sebagai seorang anggota dalam Pasukan Partai komunis Cina selama 1930an dan bekerja sebagai anggota militer untuk brigade khusus Soviet ke 88 pada awal 1940an, klaim Kim Jong-il itu sebagian besar nampaknya tidak benar. (kbsworld, 2016).

Sistem unik yang dimiliki oleh Korea Utara karena Kim Jong Il memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang mewariskan filsafat, bakat dan ajaran dari ayahnya dengan sukses membuat negara berjalan dengan sistem kekuasaan tunggal yang diwariskan dari ayah ke anak. Persiapan untuk mewariskan kekuasaan sudah dilaksanakan sejak awal tahun 1970an. Sistem itu disempurnakan saat Kim Il Sung mengatakan bahwa “Kim Jong-il memiliki kemampuan penuh untuk menangani semua tugas (sebagai pemimpin)”. Setelah kematian ayahnya Kim Il-sung, dan Kim Jong-il dilantik sebagai sekretaris umum Partai Buruh Korea pada Oktober 1997, maka sistem pewarisan terwujud secara sukses saat Kim Jong-il menjabat sebagai ketua Komisi Pertahanan Nasional pada September 1998. (kbsworld, 2016).

Kekuasaan negara terkonsentrasi pada partai, dan kekuasaan didalam partai itu dimiliki oleh satu orang secara eksklusif. Penggunaan istilah “Yuil” yang berarti ‘tunggal’ atau ‘mono’ dalam bahasa Korea Utara sebenarnya adalah ‘sistem ideologi tunggal’ berasal dari filsafat ‘pemimpin tunggal’. Dalam masyarakat Korea Utara, pemimpin adalah lambang perwujudan tekad dan keinginan partai, dan merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sisiopolitik secara terpadu dan secara utuh. Oleh karena itu, peranan dan kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditantang. (kbsworld, 2016).

Contoh dari penerapan ideologi songun dapat ditemui dalam hubungan sosial antara militer dan rakyat biasa, salah

satunya adalah militer mendapat jatah distribusi makanan lebih besar dibandingkan rakyat biasa. Militer juga diprioritaskan dalam menggunakan transportasi kereta api yang membuat rakyat biasa harus menunggu lama, karena di Korea Utara jalur kereta api hanya satu jalur. Dalam penerapan sosialis Korea Utara dengan ideologi *juche*, Korea Utara menjadi berbeda dengan negara komunis lainnya. Dalam penerapan sosialis Korea Utara dengan ideologi *juche*, Korea Utara benar-benar menjadi berbeda dengan negara komunis lainnya. Ketika terjadi perpecahan di Soviet pada akhir 1950an, Korea Utara yang awalnya pro-komunis kemudian berpindah haluan menjadi independen setelah menjadi bagian dari anggota gerakan non-blok pada 1976. (Sadzikri, 2017).

Dalam pertahanan nasional Korea Utara mengembangkan Tentara Rakyat Korea secara signifikan, dan dengan dukungan dari ideologi *sangun*, menjadi salah satu militer terkuat di dunia, juga menjadi negara yang mampu mengembangkan kekuatan nuklir sendiri. Korea Utara yang berdiri dengan bantuan dari Uni Soviet yang berideologi komunis, Korea Utara juga tetap ada setelah Perang Korea dengan bantuan dari RRC yang juga komunis. Namun, itu tidaklah menjamin bahwa Korea Utara akan menjadi negara komunis yang secara otomatis mengikuti Uni Soviet atau RRC. Seperti Indonesia mempunyai Pancasila sebagai ideologi, Korea Utara juga memiliki ideologi *juche* dan *songun* sebagai ideologi resmi Korea Utara. (Sadzikri, 2017).

Pemerintah Korea Utara memiliki 10 prinsip dalam membangun alat kontrol masyarakat, yaitu ketika, laporan, diskusi, kuliah, atau menulis sebuah artikel yang akan diterbitkan harus mengutip ajaran pemimpin tertinggi dan tidak boleh ada pelanggaran dalam tulisan atauungkapannya, semua media, penerbit dan kelompok sastra yang terbentuk di Korea Utara mesti mematuhi prinsip ini. Kalau melanggar, tambahanya, bisa dijatuhi hukuman mati. Beberapa novelis atau jurnalis yang sudah ditangkap diantaranya Hyeon Seung Geol, Choi Hak Su, Kim Jin Sung dan Lee Chun Gu. Pemerintahan Kim-jong Un juga membentuk Partai Buruh devisi propaganda yang

tugasnya membatasi dan mengontrol konten di bidang media, penerbitan dan seni budaya. Partai ini terdiri atas devisi pembimbing penerbitan, badan sensor penerbitan, devisi media cetak, devisi komunikasi, devisi penyiaran, devisi kesusastraan, devisi perfilman dan devisi pertunjukan. (Diah, 2014).

Partai ini biasanya mengarahkan keseluruhan hasil ciptaan dengan mengidolakan dinasti Kim. Khusus untuk jurnalis dan penulis dapat berkegiatan tetapi mesti terdaftar dalam Serikat Penulis Chosun dan Serikat Jurnalis. Yoon-cheol Choi sebagai Sekretaris Jenderal dari North Korea Strategy Center (NKSC), menekankan pentingnya media untuk mencegah tindak kekerasan di Korea Utara. Sistem pemerintahan Korea Utara yang totaliter membuat para warga terisolir dari dunia luar. Pemerintah, melakukan sistem pengendalian sangat ketat dan menutup mata masyarakat akan nilai kebenaran. Warga tidak pernah dengar tentang HAM dan akibatnya tidak tau bagaimana caranya untuk mendapatkan hak yang mereka miliki. Reformasi cara berpikir warga Korea Utara merupakan solusi dasar untuk menegakkan HAM di Korea Utara. Salah satunya adalah melalui media. (Diah, 2014).